

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW) DI KABUPATEN SUBANG

Oleh :

Zaenal Mustopa

zaenalmustopa784@gmail.com

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang

ABSTRAK

Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) adalah salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat di pedesaan, berdaya dan mampu mengelola sumberdaya lokal yang ada guna meningkatkan ekonomi rumah tangganya. Selain itu pula PISEW mempunyai tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, serta penguatan institusi lokal di tingkat desa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten Subang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini bahwa adanya ketidak lancaran komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat menjadi salah satu faktor terhambatnya implementasi pembangunan di Desa-desa yang dimana pemerintah desa tidak menyampaikan informasi atau kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kendala rendahnya kapasitas sumberdaya masyarakat ini dapat dilihat pada munculnya tanggapan dari kelompok tertentu bahwa program belum menyentuh kepentingan mereka dan masih adanya sikap tak-acuh dalam usaha pelestarian program yang sesungguhnya untuk kepentingan mereka. Sikap para petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang yang memonitorng hasil pekerjaan di setiap Desa sudah baik, tetapi mereka tidak datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan, mereka datang tidak bisa dipastikan, itu dikarenakan banyaknya desa yang harus di monitoring oleh mereka sementara jumlah petugas terbatas. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program PISEW

A. PENDAHULUAN

Pembangunan di negara yang sedang berkembang mengandung dua dimensi, yaitu tujuan dan proses. Tujuan pembangunan sudah pasti kondisi kehidupan yang lebih baik sebagaimana yang di inginkan oleh masyarakat. Sedangkan proses untuk mencapai tujuan itu dinyatakan dalam berbagai strategi pembangunan.

Terbelakangnya daerah pedesaan masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system social, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, Pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.

Pembangunan infrastuktur merupakan salah stu aspek penting dan vital, untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrasturktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) adalah salah stu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat di pedesaan, berdaya dan mampu mengelola sumber daya local yang ada guna meningkatkan ekonomi rumah tangganya. Selain itu pula PISEW mempunyai tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, serta penguatan institusi local di tingkat desa (Dirjen Cipta Karya, 2016).

Infrastruktur di Kabupaten Subang penting dibangun disebabkan kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari

kebutuhan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur adalah fasilitas fisik beserta layanannya yang diadakan untuk mendukung bekerjanya system social ekonomi agar menjadi lebih berfungsi bagi usaha memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai masalah.

Apalagi Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki banyak potensi baik dari segi pertanian, perikanan, perkebunan, bahkan tambang minyak bumi, dan gas hal ini tentu saja memerlukan dukungan sarana infrastruktur yang memadai guna meningkatkan potensi tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 73/KPTS/M/2019, bahwa Kabupaten Subang yang mendapat bantuan program PISEW adalah 8 Kecamatan dan 20 Desa.

B. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan tahapan penelitian yang baik, maka penelitian harus memiliki dasar atau referensi dari penelitian sebelumnya. Hal ini digunakan sebagai bahan kajian atau studi literatur dari penelitian yang dilaksanakan saat ini. Selain itu, metode yang digunakan pada penelitian terdahulu dimungkinkan dapat digunakan kembali pada penelitian saat ini. Sehingga, hal ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebaruan ilmu dengan konteks permasalahan yang berbeda.

Kebijakan sebagai suatu Tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Handoyo,2012:5).

Beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Agustino dalam bukunya Dasar-dasar Kebijakan Publik (2008,h.140) antara lain:

- a) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn
Model ini disebut dengan Model A Model of The Policy Implementation. Proses implemetasi ini dilakukan secara sengaja untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan

berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain: (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumberdaya; (3) karakteristik agen pelaksana; (4) sikap/kecenderungan para pelaksana; (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

- b) Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model ini disebut A Framework for Policy Implementation Analysis. Peranan penting implemetasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam identifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Faktor tersebut adalah: (1) mudah tidaknya masalah yang akan digarap; (2) kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat; (3) faktor diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

- c) Model George C. Edward III

Model ini disebut dengan Direct And Indirect Impact On Implementation. Menurut Edward terdapat 4 faktor yang sangat menentukan kebijakan yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur Birokrasi.

- d) Model Merilee S. Grindle Model

Grindle ini dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Process. Menurut Grindle variable yang mempengaruhi kebijakan ini adalah outcome yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang akan diraih. Pengukuran kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu (1) dilihat dari prosesnya; (2) tujuan kebijakan tercapai.

Dalam hal ini Winarno (2014:95) berpendapat bahwa: implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan George C Edward III

dalam Subarsono (2010:90) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : 1) Communicatioan (komunikasi) 2) Resources (sumber daya) 3) DispositionsI (disposisi atau sikap pelaksana) 4) Bureaucratic Structure (struktur birokrasi).

C. METODE PENELITIAN

Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini memiliki keunggulan karena masalah yang dikaji tidak sekedar berdasarkan laporan pada suatu kejadian atau fenomena saja melainkan juga dikonfirmasi dengan sumber-sumber lain yang relevan. Berdasarkan tujuan penelitian kualitatif, maka prosedur sampling yang penting adalah bagaimana menemukan informasi kunci (key informant). Orientasi mengenai informan adalah bukan berapa jumlah masyarakat yang dijadikan informan tetapi apakah data yang terkumpul sudah mencukupi atau belum.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena pada umumnya permasalahannya belum jelas, holistic, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi social tersebut diperoleh dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi social secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori (sugiyono, 2010:399).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas Wilayah Kabupaten Subang adalah 2.051,76 km² atau 6,34 persen dari luas Provinsi Jawa Barat, sedangkan ketinggian antara 0 – 1.500 m dpl. Dari sisi administrasi, wilayah Kabupaten Subang terdiri atas 30 Kecamatan dan 245 desa serta 8 Kelurahan, adapun pusat pemerintahan berada di Kecamatan Subang.

Program Infrasturktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) adalah salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat di perdesaan, berdaya dan mampu mengelola sumber daya local yang ada guna meningkatkan ekonomi rumah tangganya. Selain itu pula PISEW mempunyai tujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, serta penguatan isntitusi lokal tingkat desa.

Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilaksanakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 73/KPTS/M/2019, bahwa Kabupaten Subang yang mendapat bantuan program PISEW adalah 8 Kecamatan dan 20 Desa. Ke 9 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cisolak tiga desa, Kecamatan Kasomalang tiga desa, Kecamatan Tanjungsiang dua desa, Kecamatan Cikaum dua desa, Kecamatan Ciasem dua desa, Kecamatan Sukasari tiga desa, Kecamatan Pusakanagara dua desa dan Kecamatan Pusakajaya tiga desa. Kriteria lokasi pelaksanaan PISEW adalah memiliki potensi yang dikembangkan sebagai kawasan pusat pertumbuhan, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten, merupakan kebijakan pemerintah yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi kawasan dan menciptakan lapangan kerja.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten Subang sesuai dengan teori menurut Edward III dalam Subarsono (2010:90) yang penulis gunakan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yaitu : 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi, 4) Struktur birokrasi, untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut:

Komunikasi, Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran tugas pemerintahan termasuk didalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa terjalannya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah maka akan sangat sulit untuk diketahui apa yang telah dicapai, apa yang akan diraih serta kendala-kendala apa yang di hadapai dalam suatu pekerjaan. Dan komunikasi adalah sumber informasi dari pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan yang dibuat atau pun mengenai pembangunan. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Subang mengenai komunikasi dari pembuat kebijakan.

Sumber Daya, Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Sumber daya yang diperlukan dalam suatu kebijakan tidak hanya mengenai biaya. Akan tetapi, sumber daya juga terkait dengan sumber daya manusia, fasilitas yang disediakan dan informasi. Pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena apapun jenis kebijakan tersebut sangat memerlukan dukungan para pelaksana. Para pelaksana diharapkan paham apa tujuan dari pelaksanaan kebijakan. Tidak hanya dukungan staf dan para pelaksana, dukungan finansial, dan dukungan sarana dan prasarana juga sangat penting untuk lancarnya suatu implementasi kebijakan. Bukan hanya isi sebuah kebijakan saja yang dikomunikasi secara jelas, sumber daya juga harus tetap dipersiapkan untuk dapat melaksanakan implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak memadai. Sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana serta adanya pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada para petugas pelaksana di lapangan.

Disposisi, Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 73/KPTS/M/2019 Tentang Penetapan Lokasi Serta Besaran Bantuan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah/reward kepada para pelaksana kebijakan, jika pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi ini merupakan keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang

diuntungkan tidak hanya organisasinya saja melainkan diri pelaksana tersebut.

Struktur Birokrasi, membahas pelaksana suatu kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki. Dalam menjalankan kebijakan Struktur Organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan dalam hal pelaksanaan kebijakan Program PISEW di Kabupaten Subang tidak dapat dipisahkan dari struktur dan birokrasi yang ada pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang. Setiap program yang ada seperti sosialisasi tidak langsung maupun langsung telah disusun secara jelas dan telah dibuat struktur birokrasi. Tim Pelaksana Kabupaten Subang dibentuk dari lingkungan Dinas yang menangani infrastruktur permukiman dan instansi yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang. Anggota Tim Kabupaten diusulkan atas nama Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Anggotanya terdiri dari internal Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan melibatkan pihak luar yaitu fasilitator karena Program PISEW adalah Program yang harus ada tenaga ahli sebagai pendamping dalam pelaksanaannya. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operational Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan

menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Program PISEW bukan sekedar berbicara mengenai berapa Panjang jalan yang telah dibangun, atau berapa irigasi yang telah dibangun, akan tetapi yang terpenting dan merupakan pokok permasalahan adalah bagaimana program PISEW tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program PISEW di Kabupaten Subang masih belum optimal hal ini terlihat dari beberapa indikator : 1) kurang dilakukan sosialisasi oleh Satuan Kerja Kabupaten; 2) Keterbatasan kemampuan sumber daya; 3) Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan dikarenakan informasi ke masyarakat belum secara utuh tersampaikan dengan baik terkait Program PISEW.

Jadi keberhasilan Implementasi Kebijakan Program PISEW di Kabupaten Subang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distrorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten sebagai berikut:

1. Untuk dimensi Komunikasi dapat disimpulkan bahwa adanya ketidak lancaran komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat menjadi salah satu faktor terhambatnya implementasi pembangunan di Desa-desa yang dimana pemerintah desa tidak menyampaikan informasi secara maksimal atau kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dalam proses implementasi suatu

program dalam pemerintahan, maka komunikasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendukung berjalannya program tersebut. Bagaimana mungkin suatu program dapat terlaksana jika komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tidak berjalan dengan baik, maka sangat penting bagi pemerintah maupun masyarakat untuk memperbaiki komunikasi agar program-program pemerintah berjalan dengan efektif dan masyarakat dapat ikut serta dalam program tersebut.

2. Dalam pelaksanaan program PISEW di Kabupaten Subang, kendala rendahnya kapasitas sumberdaya masyarakat ini dapat dilihat pada munculnya tanggapan dari kelompok tertentu bahwa program belum menyentuh kepentingan mereka dan masih adanya sikap tak-acuh dalam usaha pelestarian program yang sesungguhnya untuk kepentingan mereka.
3. Untuk dimensi Disposisi dapat disimpulkan sikap para petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang yang memonitorng hasil pekerjaan di setiap Desa sudah baik, tetapi mereka tidak datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan, mereka datang tidak bisa dipastikan, itu dikarenakan banyaknya desa yang harus di monitoring oleh mereka sementara jumlah petugas terbatas dan berbagi pekerjaan dengan pelaksanaan program lain yang sedang dilaksanakan. Karena kalau para pelaksana menentang dengan adanya kebijakan Program PISEW maka proses implementasi kebijakan akan menjadi sulit. Tanpa adanya dukungan, maka pelaksana akan merasa terpaksa dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak bisa secara penuh melaksanakan kewajibannya.

4. Jadi struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan Program PISEW di Kabupaten Subang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten Subang, penulis memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah desa seharusnya memperbaiki komunikasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah karena peran masyarakat sangat penting dalam mendukung program-program pemerintah karena seperti yang diketahui saat ini implementasi pembangunan infrastruktur di desa dalam bidang jalan, jaringan dan listrik dianggap tidak optimal sehingga menghambat kelancaran aktifitas masyarakat. Perlu adanya tata kelola anggaran dana desa yang transparan dan jeli sehingga anggaran yang ada sesuai dengan peruntukannya, atau sesuai dengan (RAB) yaitu dengan cara pendamping desa harus lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.
2. Guna meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat, maka pemerintah harus lebih mengoptimalkan lagi peran dan fungsi dari fasilitator desa pada program PISEW untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk kelompok masyarakat sasaran, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, sampai tahap pelestarian program. Dan Masyarakat hendaknya dilibatkan dalam keseluruhan proses kegiatan pemberdayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monev dan penerimaan manfaat. Pemerintah daerah hendaknya segera melakukan pendataan secara jelas dan terukur tentang kriteria kemiskinan, sehingga setiap kebijakan program penanggulangan kemiskinan mempunyai sasaran dan target yang tepat.
3. Perlunya dibentuk jaringan kemitraan antara pemerintah daerah, fasilitator kegiatan dari masyarakat dan kelompok sasaran, serta seluruh stakeholder program. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan hendaknya lebih ditingkatkan dimana masyarakat tidak lagi dijadikan sebagai obyek (penerima bantuan sebagai warga miskin) tetapi menjadi subyek dan bahkan sebagai pelaku pembangunan.
4. Bagi pemerintah Kecamatan di wilayah Kabupaten Subang yang menerima bantuan program PISEW agar menindaklanjuti Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan cara memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, khususnya dilokasi Program PISEW tersebut guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta Pemerintah Kabupaten Subang diharapkan agar mengalokasikan anggarannya guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya melalui penetapan daerah Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dilokasi Program PISEW.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV.Alfabeta.
- Baedhowi. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Semarang : Pelita Insan.
- Ikhsan. 2004. Hubungan Antara Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan. LPEM, Jakarta.
- Miraza, B.H. 2005. Peran Kebijakan Publik dalam Perencanaan Wilayah. Wahana Hijau. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Vol.1 Nomor 2 Desember 2005.
- Bagong Suyanto, 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Prenada Media
- Adisasmita, H.R. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoyo Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
- Miles dan Huberman, 2004, Qualitative Data Analysis, diterjemahkan Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kualitatif, Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Rusli, Budiman. 2015. Kebijakan Publik.Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung: Hakim Publisher.
- Subarsono, AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2011. Manajemen Pemerintahan. Jakarta : Pustaka Reka Cipta.
- Wibawa, Samudra. 2010. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Widodo Eko Suparno. 2010. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 73/KPTS/M/2019 Tentang Penetapan Lokasi Serta Besaran Bantuan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2019.
- Surat Edaran Direktorat Jendra Cipta Karya Nomor: 04/SE/DC/2019 Tentang Perubahan Surat Edaran Direktorat Jendra Cipta Karya Nomor: 02/SE/DC/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya.